

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A., & Karimah, D. A. (2021). Implementasi Atas Pemberian Informasi dan Bukti/keterangan dalam Hal Akses . *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 562-584.
- Bank Indonesia. (2021, Mei). *Laporan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136-153.
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102-107.
- Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, 229-240.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Surat Edaran Direktorat Jenderal pajak Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi*. Jakarta.
- Gundari. (2013). Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2011-2012. *Tugas Akhir*.

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, L. P., & Darma, G. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemeriksaan, Kebijakan Akses Informasi Keuangan dan Forensik Digital terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 1260-1272.
- Ilhamsyah. (2020). Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa). *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 892-914.
- KPP Pratama Sleman. (2022). *Buku Profil KPP Pratama Sleman 2021*. Sleman.
- Maulida, R. (2018, September 28). Diambil kembali dari OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pasaribu, K. F. (2021). Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23/26 Oleh PT XX. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). (2020, 11 17). *KOMPAS.com*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/17/165759669/penggolongan-pajak-di-indonesia>

- Republik Indonesia . (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara.
- Rusdiono Consulting. (2021, Feruary 16). Diambil kembali dari 3 Sistem Pemungutan pajak di Indonesia Beserta Contohnya: <https://www.rusdionoconsulting.com/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- Santika, I. P. (2020). Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyetoran pajak Penghasilan 26 Sektor Usaha Penyediaan Akomodasi di KPP Pratama Badung Selatan. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Strong, M., D., W. Lee, Y., & Y Wang, R. (1997). Data Quality In Context. 103-110.
- Suryanto, S. (2020, Juni 18). Diambil kembali dari <https://www.ssas.co.id/realisasi-pajak-ambles-hanya-pph-pasal-26-dan-pph-op-yang-tumbuh-positif/>
- Waluyo, T. (2020). PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT, KETENTUAN DAN PEMILIHANNYA SESUAI SE-15/PJ/2018. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 677-698.